

iNLiIT

Informasi dan Literasi: Newsletter Perpustakaan DPR

Artikel Bulan Ini

Bedah buku: Platform Perikanan Nasional Untuk Mencapai SDG'S 14

Ultah Jakarta 22 Juni: Riwiyat Passer Baroe

Banjir Jakarta dari Masa ke Masa

Infografis



Perikanan Nasional dan SDG's 14

Laut Indonesia dipenuhi dengan sumber daya alam yang melimpah khususnya ikan. Ini adalah karunia yang tak terhingga nilainya. Bila digarap dengan benar akan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan amanat SDG's 14 (*Sustainable Development Goal's*), yaitu tentang perlunya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani program SDG's, telah membuat sejumlah langkah agar target SDG's 14 di tahun 2030 dapat tercapai. Namun dalam praktiknya masih terjadi kontroversi. Di antaranya masih adanya berbagai persoalan yang mendasar seperti tidak adanya *platform* nasional yang dapat menjembatani seluruh *stakeholder*. Berubah-ubahnya peraturan mulai dari cara penangkapan ikan sampai dengan pajak dan ketentuan ekspor-impor ikan. Sinergi antar *stakeholder*, baik pembuat kebijakan, nelayan, pengusaha, akademisi, media, kelompok gender belum benar-benar terbentuk dengan baik. Isu-isu penting itu dibahas dalam acara bedah buku "*Platform Perikanan Nasional Untuk Mencapai SDG's 14*", karya Dr. Nimmi Zulbarnaini, S.Pi., M.Si., kerjasama Bagian Perpustakaan-Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Sekolah Bisnis IPB (Institut Pertanian Bogor) pada tanggal 25 Juni 2021 yang laporannya dimuat dalam edisi iNLiIT kali ini.



Elvira Dianti A., S.S., M.Si.
Kabag Perpustakaan DPR

Penasihat Utama:
Dra. Damayanti, M.Si;
Penasihat: Nunu Nugraha
Khuswara, S.H., M.H;
Pengarah: Drs, Suratna, M.Si;
Editor Kepala/Penangguna
Jawab: Elvira Dianti, S.S.,
M.Si.; Editor Pelaksana:
Widya Chalid, S.H., Tenny
Rosanti, S.Sos. M.Si., Djati
Ardjani S.IP., Magfira, S.IP.;
Public Relations: Mustika
Wati, S.Sos., M.Hum.; Media
Sosial: Ridwan Faridan,
S.Sos.; Editor bahasa: Indira
Nadya Paramitha, S.Hum.;
Analisa Strategi & Program:
Qatriatna Widiasti Soeharto,
S.Hum., Rini Widyastuti;
Sarana & Prasarana: Yat
Afiatna Sisyadi; Distribusi
dan Layanan: Desti Ariesti
Rohim, S.Sos., Lusida R.
Sitompul, Fatih Farhan;
Administrasi: Ratna
Waspadhani, S.S., Agung
Permata, S.A.P, Nurlaila
Qurniati; Alamat:
Perpustakaan DPR. Gedung
Nusantara II/Lt.2, Jl. Jenderal
Gatot Subroto, Jakarta Pusat
10270. email:
perpustakaan@dpr.go.id

Transformasi Perpustakaan DPR

Pada tahun 1969 Gerard E. Caiden menulis sebuah buku berjudul *Administrative Reform* yang antara lain meng-*highlight* pentingnya proses transformasi bagi lembaga pemerintah. Transformasi dalam hal ini berubah dari lembaga yang pasif menjadi lembaga yang lebih pro-aktif, lebih berkinerja, terkenal dan termanfaatkan (meminjam istilah Karo Protokol dan Humas, Bapak Suratna).

Berkaca dari teori di atas, Perpustakaan DPR berupaya untuk bertransformasi menjadi tempat yang lebih nyaman, representatif, kekinian dan mendukung produktivitas dan kreativitas.

Proses transformasi di perpustakaan meliputi peningkatan fasilitas, pengembangan koleksi, peningkatan kualitas SDM, dan memperkuat jejaring, baik dengan unit-unit kerja di lingkungan Setjen DPR maupun dengan lembaga-lembaga eksternal.

Berbagai kegiatan yang sedang marak dilakukan di masa pandemi, misalnya webinar juga kerap diadakan. Baik itu secara daring maupun *hybrid* (sebagian kecil hadir tatap muka). Alhamdulillah kegiatan webinar perpustakaan mendapat tanggapan yang positif dari para peserta. Dengan tak sengaja, perpustakaan menciptakan khalayak pengguna baru, yaitu kalangan pengguna digital.

Di era teknologi 4.0 ini sangat penting untuk memanfaatkan internet untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satunya untuk mempromosikan layanan Perpustakaan DPR melalui media sosial.

Kami sadar itu semua membutuhkan waktu, kerja keras, dan dukungan dari pimpinan Setjen DPR, unit-unit kerja, dan seluruh pengguna perpustakaan.

Semoga transformasi perpustakaan DPR ke arah yang lebih baik dapat terwujud.

Salam literasi.





Perikanan Nasional: Butuh Platform Bersama

Untuk mencapai SDG's 14

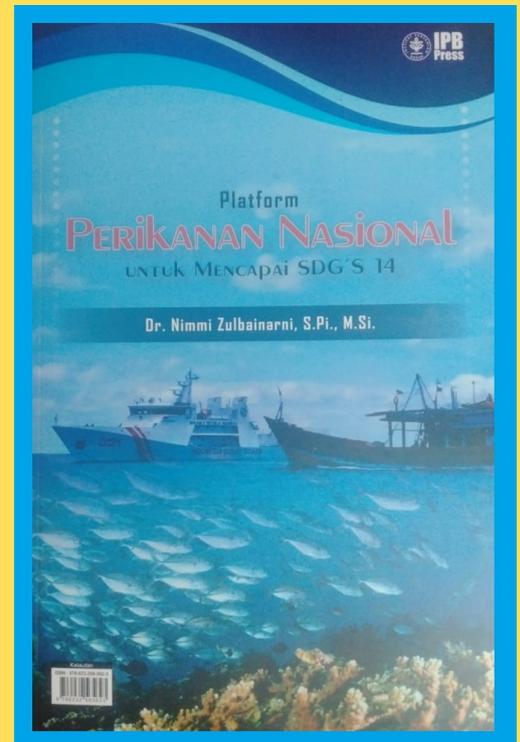
Dunia perikanan nasional Indonesia saat ini membutuhkan sebuah platform bersama yang bisa menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan perikanan nasional guna mencapai target peningkatan pendapatan ekonomi nasional sekaligus sarana meningkatkan kesejahteraan bangsa, khususnya masyarakat maritim Indonesia. Demikian antara lain pandangan yang mencuat dalam acara bedah buku "Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG'S 14"

25 Juni 2021, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI. Acara tersebut merupakan kerjasama Perpustakaan DPR dengan Sekolah Bisnis IPB. Hadir 6 (enam) orang pembicara yang mewakili *stakeholder* yang berkepentingan dengan persoalan perikanan nasional. Hadir antara lain Dr. Nimmi Zulbainarni mewakili kelompok akademisi sekaligus penulis buku yang dibedah, Yeka Hendra Fatika Anggota Ombudsman RI, Hendra Sugandhi selaku pelaku bisnis perikanan, Ichsan Firdaus, Ketua Komisi IV DPR. Keempat pembicara hadir langsung.



Liputan Bedah buku ini dapat disaksikan juga di kanal Youtube Perpustakaan DPR

Laporan Oleh: Widya Chalid



Sedangkan 3 (tiga) pembicara lain hadir secara virtual, yaitu Dody Budi Waluyo Deputy Gubernur Bank Indonesia, Prof. Syarif Wijaya mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan RI, serta Dr. Sri Yanti, MPM., Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas.

Acara dimulai dengan pembacaan sambutan dari Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB dan dilanjutkan pembukaan acara oleh Sekjen DPR, Dr. Indra Iskandar.

Semua pembicara kompak menyambut baik kehadiran buku "Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG's 14" dan berharap buku ini akan menjadi referensi dalam membentuk platform tata kelola perikanan dan memecahkan berbagai permasalahan persoalan perikanan nasional mulai dari hulu sampai ke hilir.



Dr. Indra Iskandar, Sekjen DPR RI. Kami sangat mendukung diterbitkannya buku ini. Terkait konversi dan pemanfaatan sumber daya laut dalam pembangunan yang berkelanjutan. Saya kira Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan banyak literasi di bidang perikanan. Di samping itu dibutuhkan peran aktif, termasuk dari parlemen dalam mendukung suksesnya perikanan nasional untuk mencapai tujuan SDG's. Sinergi yang harmonis akan mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Diperlukan juga satu platform yang dapat menjembantani kepentingan multi *stakeholder*. Saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini. Semoga karyanya dapat menginspirasi dan memperkaya wawasan kita.

Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec, Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB, Bogor. Buku yang ditulis oleh Dr. Nimmi Zulbarnaini ini merupakan buku yang penting yang diharapkan bisa berkontribusi dalam upaya membangun kerjasama antar *stakeholder* perikanan nasional. Jika kita membangun kerjasama antar *stakeholder*, hasilnya pasti bagus. Pemerintah dan masyarakat. Kami dengan bangga mempersembahkan buku yang ditulis oleh Dr. Nimmi Zulbarnaini yang juga salah satu kolega kami di Sekolah Bisnis IPB.



Saya kira Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan banyak literasi di bidang perikanan





Perikanan
kita adalah
*sleeping
giant.*



Dr. Nimmi Zulbainarni (penulis buku).

Bertepatan dengan hari ulang tahun saya, saya meluncurkan buku ini. Berharap berguna buat bangsa ini. Seperti kita ketahui negara kita 2/3 nya adalah lautan. Dengan potensi yang begitu besar, kontribusi perikanan nasional terhadap ekonomi nasional masih kecil. Dikaitkan dengan SDG's 14, *life below water*, yang harus kita capai pada 2030. Untuk mencapai semua itu semua *stakeholder* harus bersinergi. Mulai dari ABG (akademisi, bisnis dan *government*) serta kelompok media, komunitas dan kelompok gender. Melalui buku ini kita bisa melihat akar masalah dan solusi agar sektor ini bisa berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Buku ini juga dimaksudkan sebagai sumbangsih saya selaku akademisi untuk memperkaya *research* dan gap pengetahuan di bidang perikanan nasional.

Ichsan Firdaus, Ketua Komisi IV DPR. Kita perlu platform perikanan nasional. Perikanan kita adalah *sleeping giant*. Raksasa yang tidur. Sampai detik ini kita tidak melihat *sleeping giant* bangun. Puncaknya ketika para nelayan cantrang, Pantura, berdemo ke Istana Negara. Karena kebijakan yang kontroversial. Kita perlu ada *platform* untuk menjaga konsistensi. Agar para *stakeholder* konsisten. Tarik ulur terkait *sustainability* vs kesejahteraan tidak perlu diperdebatkan, tapi dicarikan jalan keluar.



Dody Budi Waluyo, Deputy Gubernur BI.

Kami sepakat dengan konteks kelembagaan pencapaian visi dan misi mencapai SDG's di Indonesia, membutuhkan kerjasama lintas sektor yang erat. Termasuk di dalamnya untuk merubah struktur budaya dan birokrasi kebijakan tidak mudah bila hanya mengandalkan satu dua entitas saja. Tapi kini sudah mendapat respon positif dan agenda besar, khususnya pemerintah daerah. Seiring dengan kesadaran yang meningkat tentang pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga sependapat bahwa dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan sebagai katalis untuk mengurai hambatan dari sektor hulu ke hilir, apalagi sabagai potensi pembangunan ekonomi melalui jalur ekspor dan manfaat bagi nelayan khususnya di wilayah timur Indonesia. Pesan utama dalam buku ini sangat tepat. Harus ada upaya mengurai hambatan dari sektor hulu hingga hilir. SDGs tak bisa dilaksanakan sporadis, melainkan harus terencana, terukur, dengan indikator yang jelas. Sangat tepat penulis menggunakan *root cause* analisis yang komprehensif dan melibatkan semua *stakeholder* guna menghindari konflik antara isu sosial dan isu lingkungan.

Hendra Sugandhi, Pelaku Usaha. Pelaku usaha menyambut baik diterbitkannya buku ini yang diharapkan dapat menambah referensi yang bermanfaat bagi sektor perikanan. Buku ini membawa nuansa baru, karena tidak hanya membahas tataran konseptual (*das sollen*) tapi juga kesenjangan dengan dunia nyata (*das sein*). Saya harap buku ini bisa menjadi acuan berpikir khususnya penggunaan metode *root cause analysis* dalam membedah persoalan-persoalan yang nyata terjadi di dunia perikanan nasional beserta solusinya. Namun demikian di beberapa bagian masih diperlukan pemutakhiran data.



Pesan utama dalam buku ini sangat tepat. Harus ada upaya mengurai hambatan dari sektor hulu hingga hilir.





SDG's 14 *life below water*. Memiliki target antara lain mengurangi pencemaran laut, melindungi ekosistem laut, meminimalisasi dampak pengasaman laut, mengatur dampak kerusakan laut

Syarif Wijaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah telah merbitkan Perpres No. 59 tahun 2017. Dan memasukkan SDG's dalam RPJMN 2020-2024. Serta RKP pemerintah setiap tahun. KKP secara khusus mendukung SDG's 14 *life below water*. Memiliki target antara lain mengurangi pencemaran laut, melindungi ekosistem laut, meminimalisasi dampak pengasaman laut, mengatur dampak kerusakan laut, mengatur dampak penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, melarang penangkapan ikan secara berlebihan, meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya ikan yang berkelanjutan, meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi, menyediakan akses untuk pasar bagi nelayan kecil serta menegakkan hukum laut internasional.

RPJMN 2020-2024 meliputi beberapa prioritas, di antaranya, pertama ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, dengan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, mutu investasi dan perlindungan terhadap nelayan, budidaya ikan serta *research* SDM. Prioritas kedua yakni, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, antara pembangunan barat dan timur.

Prioritas ketiga adalah lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim melalui konservasi laut, prioritas selanjutnya adalah polhukam, pelayanan publik yang berfokus pada pengendalian *illegal fishing*.



Saya berharap idealisme penulis dapat diimplementasikan ke dalam regulasi secara konsisten.



Dr. Ir. Sri Yanti, MPM., Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Bappenas. SDG's adalah aksi global yang telah disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan sangat sarat dengan persyaratan keberlanjutan. *Life below water* sudah kita masukkan ke dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Buku ini memuat urgensi tantangan dan rekomendasi dengan mengelaborasi masalah yang muncul di permukaan dari seluruh permasalahan yang ada di bawahnya. Saat ini kita menjadikan WPP sebagai basis pembangunan perikanan dan kelautan. Ditujukan untuk kolaborasi dan integrasi di semua sektor, untuk mewujudkan SDG's 14. Platform ini strategis dalam mengawal pembangunan perikanan nasional berbasis WPP.

Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI.

Saya membaca dengan seksama buku ini. Saya beli 10 (sepuluh) buku Dr. Nimmi agar bisa dibaca juga oleh rekan-rekan saya di Ombudsman. Dalam membangun, selalu saja problem kita adalah data. Data yang salah menyebabkan perencanaan yang salah. Poin kami adalah perbaikan tata kelola dan regulasi. Yang saya catat adalah perikanan tangkap belum berkelanjutan dan berkesejahteraan. Diperlukan platform perikanan. Saya berharap idealisme dari penulis dapat diimplementasikan ke dalam regulasi secara konsisten. Kami berwenang untuk merekomendasikan. Saat ini ada dua kasus yang masuk ke Ombudsman, yaitu kasus garam dan kasus lobster. Catatan kami adalah perlunya kajian dan penelitian terkait konsep SWF (*Sovereign Wealth Fund*), dananya untuk membiayai riset. Hal ini sudah jadi konsensus bersama antara Kementerian Kelautan dan Ombudsman.

HUT Jakarta 22 Juni

Riwayat Passer Baroe

Oleh: Djati Ardjani
(Pustakawan Muda)

Siapa yang tidak kenal dengan Pasar Baru ? Nama ini cukup populer di telinga orang Jakarta. Pasar Baru terletak di pusat kota, tak jauh dari situs-situs penting di Jakarta seperti Mesjid Istiqlal dan Istana Negara. Tepatnya di Jalan Pasar Baru Jakarta Pusat . Pasar Baru merupakan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Nama ini sudah ada sejak zaman VOC sekitar tahun 1820 dengan nama Passer Baroe atau De Nieuwe Markt.



Passer Baroe (Pasar Baru) tempo dulu. Sumber foto: Google

Oleh Daendels, Gubernur-Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808-1811, Passer Baroe sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan warga Eropa dan Belanda yang semakin banyak berdatangan ke Batavia. Saat itu, orang Eropa sudah banyak bermukim di sekitaran Jalan *Rijswijk* yang sekarang dikenal dengan Jalan Veteran, *Noordwijk* (Jalan Juanda), Pecenongan, hingga pintu air.

Abad ke-19 Pasar Baru identik dengan pusat perbelanjaan bergensi orang-orang Eropa. Pasar ini mempertemukan orang-orang dari berbagai ras di Batavia mulai warga Tionghoa, India, Eropa, sampai Melayu. Barang-barang yang dijual di Passer Baroe pun beraneka ragam. Mulai dari barang primer, sekunder serta tekstil yang diperdagangkan oleh orang-orang keturunan India.

Saat memasuki area Passer Baroe para pengunjung disambut oleh sebuah gerbang tinggi bergaya Tionghoa. Keunikan gaya bangunan toko berarsitektur Tionghoa dan Eropa menambah keindahan suasana. Selain menjadi pusat perbelanjaan, Passer Baroe juga menjadi lokasi di mana kita bisa menemukan Kuil Sikh atau Gurdwara yang merupakan tempat beribadah masyarakat keturunan India.

Riwayat Passer Baroe



Passer Baroe (Pasar Baru) tempo dulu.
Sumber foto: Google

Pada tahun 1920-an situasi Passer Baroe sudah banyak berubah. Kendaraan bermotor mulai terlihat lalu lalang, meski masih jarang. Karena kendaraan bermotor hanya dimiliki oleh orang Eropa atau pribumi kaya raya.

Sejak tahun 2003 Pemda Provinsi DKI menggelar Festival Passer Baroe yang diselenggarakan rutin tiap tahun bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta.

Tantangan terbesar bagi Pasar Baru sekarang adalah Covid-19. Sama seperti kawasan lainnya, toko-toko di Pasar Baru mulai sepi pengunjung.

Melihat kondisinya terkini memang bukan seperti biasanya. Namun, keyakinan agar tempat itu tetap bertahan masih terus ada. Salah satu faktornya adalah pengalaman para pedagang di sana yang telah puluhan tahun diterjang berbagai kendala, tapi mereka terus mampu beradaptasi dan hidup hingga saat ini. (Djati A/INLIT)

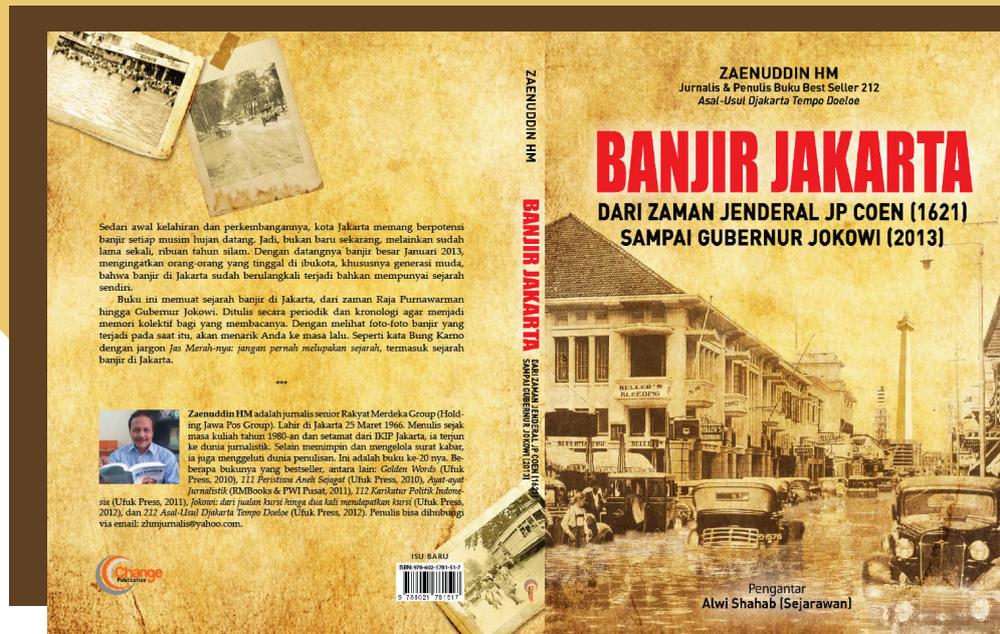
Salah satu keunikan Pasar Baru adalah keberagaman etnisnya. Salah satunya adalah keberadaan etnis India. Seperti disebutkan di Wikipedia, di Pasar Baru banyak bermukim orang India-Indonesia. Orang India-Indonesia berdagang menjual kain, alat olahraga, dan sepatu di Pasar Baru. Pada tahun 2002 ada sekitar 2.000 keluarga India yang terdaftar sebagai penduduk Jakarta, dan sebagian besar di antara mereka tinggal di pusat kota, khususnya di kawasan Pasar Baru dan Pintu Air.

Disebutkan pula di Wikipedia, masih ada beberapa toko lama yang sampai sekarang masih tetap ada di Pasar Baru. Di antaranya adalah Apotek Kimia Farma, toko Lee le Seng, toko perabot rumah tangga Melati, toko jam Tjung-Tjung, dan toko kacamata Seis (Tjun Lie). Penjahit jas yang sudah ada sejak dulu adalah Isardas, Hariom, dan Gehimal, dan wanita berbelanja di toko kain Bombay dan Lilaram. Toko-toko besar yang dulunya pernah ada di antaranya Toko Eropa dan Toko de Zon. Pengusaha ritel Matahari Putra Prima mendirikan bisnisnya di Pasar Baru pada tahun 1958 (Sumber: Wikipedia)

HUT Jakarta 22 Juni Banjir Jakarta dari Masa ke Masa

Oleh: Magfira
(Pustakawan Muda)

Judul Buku: Banjir Jakarta
Penulis: Zainuddin HM
Penerbit: Change
Publisher
Tahun Terbit: 2013
ISBN: 978-602-17815-1-7
Halaman: 150 halaman
No. Panggil: 627.4 ZAE b
Koleksi: Perpustakaan
DPR RI



Kamis, 17 Januari 2013, langit di atas kota Jakarta tampak mendung. Ya, hari itu Ibukota memang dilanda banjir besar. Hampir seluruh wilayah Ibukota terendam banjir. Ada yang semata kaki, sampai lutut, malah setinggi paha dan pinggang orang dewasa. Beberapa gedung perkantoran tak luput dari genangan. Ruas-ruas jalan utama di Ibukota termasuk jalan MH Thamrin, jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, dan kawasan Istana Negara ikut kebanjiran. Hari itu aktivitas warga terhenti. Jakarta seolah lumpuh.

Sejumlah kalangan bertanya-tanya mengapa Jakarta terus kebanjiran. Banjir terus berulang bagai siklus 4-5 tahunan. Tahun 2002, 2007, 2013. Para ahli malah mengatakan, setiap tahun pun Jakarta berpotensi banjir. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak ada upaya untuk mengatasi banjir?

Upaya untuk mengatasi banjir sudah dilakukan sejak puluhan abad silam. Ketika itu Jakarta masih dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara pimpinan Raja Purnawarman. Kala itu Sang Raja menggali dua sungai di Bekasi dan Tangerang guna mengatasi banjir yang merendam kota.

Selanjutnya para Gubernur Jenderal Belanda juga berusaha mengatasi banjir yang melanda Batavia. Dari Gubernur Jan Pieterszoon Coen sampai AWL Tjarda van Starckenborgh Stachouwer. Tapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Singkatnya, 60 gubernur jenderal Hindia Belanda yang pernah berkuasa dan berdomisili di Batavia, tidak ada yang mampu mengatasi banjir di kota ini.

Banjir Jakarta: Kesalahan JP Coen?

Ada yang menganggap banjir di Jakarta adalah kesalahan JP Coen membangun kota ini di dataran rendah, di bawah permukaan air laut. Coen-lah yang mengawasi pembangunan kota Batavia setelah berhasil merebut kota ini dari tangan Kesultanan Banten pada 30 Mei 1619.

Buku "Banjir Jakarta: dari Zaman Jenderal JP Coen (1621) sampai Gubernur Jokowi (2013)" yang ditulis oleh Zaenuddin HM ini memuat sejarah banjir di Jakarta, dari zaman Raja Purnawarman hingga Gubernur Jokowi. Ditulis secara periodik dan kronologis agar pembaca dapat membayangkan dan membandingkan peristiwa banjir Jakarta dari masa ke masa.

Dengan melihat foto-foto banjir yang terjadi pada saat itu, pembaca akan ditarik untuk menengok salah satu aspek sejarah tata kota Jakarta. Penulis buku ini, Zaenuddin HM adalah jurnalis senior Rakyat Merdeka Group (Holding Jawa Pos Group). Buku-buku yang ia tulis sudah banyak memenuhi rak toko buku di negeri ini, di antaranya: *How to be a Writer*, *The Journalist*, *Freelance Media*, *Trilogi Jakarta*, *Golden Words*, *Messages of Success*, *Jokowi* dan *Abraham Samad*.

Buku ini sangat layak untuk dibaca sebagai tambahan pengetahuan dan mengembalikan memori kita ke masa lalu. Juga membuka kesadaran kita agar selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan apalagi membuang sampah di sungai. Banjir Jakarta adalah masalah yang harus diatasi oleh semua warga Jakarta. Mulai dari Gubernur sampai warga biasa bahu membahu bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. (INLIT)



Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal wilayah kongsi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang keempat dan keenam. Ia dua kali memerintah. Pertama pada tahun 1619 – 1623 kemudian yang kedua pada tahun 1627 – 1629.

Ada yang menganggap banjir di Jakarta adalah kesalahan JP Coen. Dia membangun kota ini di dataran rendah, di bawah permukaan air laut.

Coen-lah yang mengawasi pembangunan kota Batavia setelah berhasil merebut kota ini dari tangan Kesultanan Banten pada 30 Mei 1619.

Berkreasi di Masa Pandemi

Laporan dari Bedah Buku "Catatan Pustakawan: Kreasi di Masa Pandemi" yang diadakan oleh Dispusipda (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah) Jawa Barat Oleh: Tenny Rosanti Pustakawan Madya

Hadirnya buku Catatan Pustakawan: Kreasi di Masa Pandemi merupakan kerja sama Ikatan Pustakawan Indonesia Jawa Barat (IPI Jabar) dan Ruang Baca Komunitas (RBK). Buku ini merupakan sebuah antologi, kumpulan inspirasi dari 15 Pustakawan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola informasi publik. Karya ini diharapkan dapat menjadi gagasan inspirasi untuk membakar semangat pustakawan dalam berinovasi di tengah pandemi dan juga agar dapat terus bertransformasi sebagai mata tombak literasi informasi di Indonesia.

The poster is for a virtual book review event titled "BEDAH BUKU VIRTUAL Catatan Pustakawan: Kreasi di Masa Pandemi". It is scheduled for Thursday, June 24, 2021, from 09:00 to 12:00. The event is organized by Dispusipda Jabar and IPI Jabar. The poster features a central graphic of an open book with various icons and text. It lists the following participants and their roles:

- OPENING SPEECH:** Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si., Kepala DISPUSIPDA Prov. Jawa Barat, Pembina PD IPI Jawa Barat.
- PEMBAHAS:** Dr. Agus Rusmana, MA., Dosen Universitas Padjadjaran, Pembina PD IPI Jawa Barat.
- PENGANTAR:** "PUSTAKAWAN PENDORONG KEMAJUAN" Dr. Abdul Kahar M.Pd., Kepala PLPP Kemendiknas RI.
- PENGANTAR:** "PUSTAKAWAN MASA LALU, MASA KINI DAN NANTI" Dr. Hj. Oom Nurrohmah M.Si., Ketua PD IPI JABAR.
- MODERATOR:** Sofian Munawar, MA, Pemimpin Ruang Baca Komunitas.

The poster also lists several speakers (NARA SUMBER) and their topics:

- "MODEL PEER TUTORING UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA MILENIAL" by Dr. Hj. Neni Alyani, Pengurus PD IPI JABAR.
- "LAYANAN PUSTAKA OBSERVATORIUM BOSCHA: MENEMBUS BATAS GLOBAL" by Elyani Sulistialie SPd Nipd, Pustakawan Boscha ITB.
- "PERJALANAN SATU TAHUN PERPUSTAKAAN DPR DI MASA PANDEMI" by Tenny Rosanti S.Sos.M.Si, Pustakawan DPR RI.
- "PERGERAKAN MODEL LAYANAN PERPUSTAKAAN DIPLOMASI, KEMENTERIAN LUAR NEGERI SELAMA PANDEMI COVID-19" by Sri Rokhyatun, Pustakawan Kemenlu.
- "PUSTAKAWAN: PENJAGA PERADABAN BANCSA" by Wildan Nirmala S.Sos MM, Pustakawan BNPB Kemendikbud.

At the bottom, there is a QR code and contact information: "Join Zoom Meeting Meeting ID: 990 3621 6000 Passcode: pustakawan", "Scan to Join Zoom Meeting", "pdipi.jawabarat@gmail.com", and "+62 81 324796".

Kegiatan bedah buku "Catatan Pustakawan: Kreasi di Masa Pandemi" berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan mengundang antusias 223 peserta. Acara dibuka oleh Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si, selaku Kadispusipda Jabar. Pada bedah buku kali ini diberikan pengantar oleh Dr. Hj. Oom Nurrohmah (Ketua PD IPI Jabar) dan pembahasan materi yang diberikan oleh Dr. Agus Rusmana (Dosen UNPAD & Pembina PD IPI Jabar). Kegiatan ini menghadirkan narasumber yakni:

Dr. Hj. Neni Alyani, S.E., M.Pd. (Dosen IPDN & Pengurus IPI Jabar) mempresentasikan tulisannya yang berjudul "Model *Peer Tutoring* untuk meningkatkan Minat Baca Milenial". Belajar merupakan proses perubahan seseorang karena pengalaman. Namun pembelajaran teman sebaya atau *peer tutoring* lebih diminati oleh kaum milenial. Tentu saja *peer* yang dipilih adalah yang memiliki kelebihan dari pada milineal lainnya. Artinya seorang tutor adalah milenial yang lebih pintar atau lebih memahami atau lebih sering menggunakan perpustakaan dibandingkan milenial lainnya.

Narasumber kedua adalah Dra. Elyani Sulistialie (Pustakawan Boscha ITB) dengan tulisannya yang berjudul "Layanan Observatorium Bosscha: Menembus Batas Global". Diawali dengan mempresentasikan sejarah Perpustakaan Observatorium Boscha, kemudian layanan pustaka selama pandemi dan sepek terjang Pustakawan memanfaatkan jejaring komunitas Astrolib Digest untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.



**Dr. Ir. Ahmad Hadadi,
Kadispusipda Jabar**



**Dr. Agus Rusmana,
Dosen UNPAD &
Pembina PD IPI Jabar**



**Tenny Rosanti, M.Si.
Pustakawan DPR**



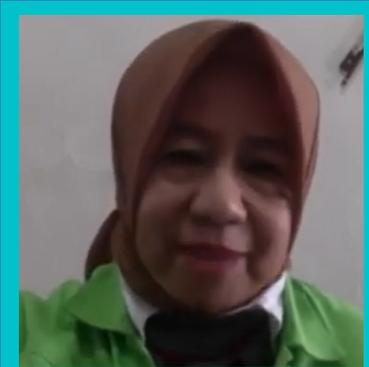
**Sofian Munawar, MA.,
Moderator**



**Sri Rokhyatun,
Pustakawan Kemenlu**



**Wildan Nirmala, M.M.,
Pustakawan BPNB Jabar
UPT Kemendikbud**



**Dr. Hj. Neni Alyani
Dosen IPDN & Pengurus IPI Jabar**



**Dr. Hj. Oom Nurrohmah,
Ketua PD IPI, Jabar**

Narasumber selanjutnya Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si. (Pustakawan Perpustakaan DPR) DPR di Masa pandemi". Kesempatan ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan Perpustakaan DPR mulai dari layanan, kemudian inovasi dan kegiatan yang dilakukan di masa pandemi. Dengan harapan, publik lebih mengenal dan memanfaatkan layanan yang ada di Perpustakaan DPR.

Narasumber keempat adalah Sri Rokhyatun (Pustakawan Kementerian Luar Negeri) dengan tulisannya yang berjudul "Pergeseran Model Layanan Perpustakaan Diplomasi, Kementerian Luar Negeri Selama Pandemi Covid-19". Presentasi diawali dengan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi pandemi, kemudian penyesuaian wajah layanan dan inovasi yang dilakukan selama pandemi serta penyesuaian skema kerja para Pustakawannya.

Narasumber terakhir Wildan Nirmala, S.Sos, MM (Pustakawan BPNB Jabar UPT Kemendikbud) dengan judul tulisannya "Pustakawan: Penjaga Peradaban Bangsa". Dalam presentasinya, diuraikan tentang tugas Pustakawan sebagai penjaga peradaban. Dengan peran penting ini maka Pustakawan harus memiliki wawasan yang luas, tekun, sabar dan dapat berkomunikasi dengan baik.



Perpustakaan DPR RI

Selamat Hari Pustakawan

dan

Hari Ulang Tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
ke-48 tahun (1973-2021)



@perpustakaanDPR



@perpustakaanDPR

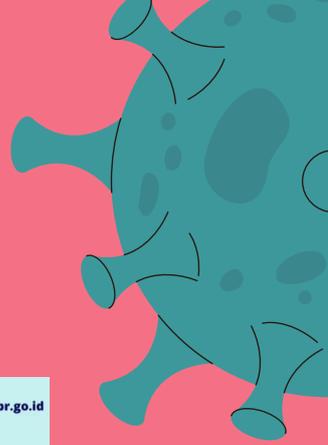


Perpustakaan DPR

Pengertian Pustakawan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan



Begini Cara Pengembalian Buku Perpustakaan Di Masa Pandemi Covid19



Perpustakaan DPR RI perpustakaan.dpr.go.id



Cara Mengembalikan Buku
MASA PANDEMI COVID-19

How to return a book during the Covid-19 pandemic

1

Perpustakaan DPR RI perpustakaan.dpr.go.id

TULIS NAMA PEMINJAM DI SELEMBAR KERTAS

WRITE THE NAME OF THE BORROWER ON A PIECE OF PAPER



2

Perpustakaan DPR RI perpustakaan.dpr.go.id

3



INSERT THE PAPER INTO THE BORROWED BOOK

SELIPKAN KERTAS KE DALAM BUKU YANG DIPINJAM

Perpustakaan DPR RI perpustakaan.dpr.go.id

4

LETAKKAN BUKU DI LOKER "PENGEMBALIAN BUKU"

PUT THE BOOK IN THE "PENGEMBALIAN BUKU" LOCKER



Perpustakaan DPR RI perpustakaan.dpr.go.id

5



THE BOOK WILL BE INPUT AFTER 1 DAY QUARANTINE

BUKU AKAN DI INPUT SETELAH DIKARANTINA 1 HARI

Perpustakaan DPR RI perpustakaan.dpr.go.id

Selamat Membaca,

6

Salam! Literasi!

 @PerpustakaanDPR  @PerpustakaanDPR
 Perpustakaan DPR